

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Adi Putra Miswar^{1*}, Abdi², Nur Wahid³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

Education and training are really needed to improve the performance of ASN in the Central Mamuju Regency Communication and Information Service so that the human resources produced are of high quality and professional in their field. It is hoped that the phenomena seen can improve knowledge, skills and attitudes, thereby creating good quality work at the Central Mamuju Regency Communication and Information Service. The aim of the research is to determine the effectiveness of education and training for state civil servants in the Central Mamuju Regency Communication and Informatics Service and to determine the internal and external factors of education and training for state civil servants in the Central Mamuju Regency Communication and Informatics Service. The method used by researchers is a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the research show that education and training play a very important role in improving the performance and services of ASN and have been realized well but are not yet optimal, as seen from internal and external factors and also seen from the effectiveness measurement theory according to Richard M. Steers so that employee performance is expected to be able to work. to be better so that it is hoped that it will be able to provide better services to the community.

Keywords: *effectiveness, education and training, state civil service*

Abstrak

Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah agar sumber daya manusia yang dihasilkan berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Fenomena yang terlihat diharapkan agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, sehingga terciptanya kualitas kerja yang baik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah dan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan ASN dan sudah terealisasi dengan baik namun belum optimal, yang dilihat dari faktor internal dan eksternal dan dilihat juga dari teori pengukuran efektivitas menurut Richard M. Steers sehingga kinerja pegawai diharapkan dapat berkerja untuk lebih baik sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat.

Kata kunci: efektivitas, pendidikan dan pelatihan, aparatur sipil negara

* adi@gmail.com

PENDAHULUAN

Mamuju Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju yang disahkan dalam sidang paripurna DPRD RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang Perencanaan UU Daerah Otonom Baru (DOB). Ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah adalah Tobadak. Secara administrasi, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terbagi atas 5 kecamatan, yaitu: Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa (Sulbar BPK RI 2011). Kabupaten Mamuju Tengah ini tergolong masih baru, namun Kabupaten ini memiliki komitmen dan juga harapan yang tinggi terhadap kualitas pemerintahannya. Berbagai hal dan upaya dilakukan untuk menjaga kualitas dan stabilitas pemerintah di wilayah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dengan adanya pendidikan dan pelatihan terhadap ASN khususnya pada Dinas Kominfo.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah organisasi pemerintah atau birokrasi, karena sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah aparatur sipil negara atau ASN yang kemudian sebagai penggerak organisasi

birokrasi dalam pengelolaan pemerintahan guna menyiapkan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik dari para aparatur tentunya sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk menghadapi tuntutan tugas selaku abdi Negara dan masyarakat, terutama untuk menjawab tantangan zaman global maka pengembangan sumber daya manusia merupakan hal keharusan. Dengan program pengembangan sumber daya manusia yang baik, diharapkan organisasi akan memiliki kekuatan yang kuat dalam berkompetitif dan bersaing secara positif baik dalam lingkup nasional ataupun global.

Sebagai salah satu pendukung UU No 5 Tahun 2014 dalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil, PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menerangkan bahwa pengelolaan pegawai merupakan usaha untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN.

Menurut Anriza Julianry, Efektivitas Pendidikan dan pelatihan merupakan proses yang berlanjut dan bukan proses sesaat saja terutama disaat perkembangan teknologi dan

pengetahuan berkembang pesat seperti saat ini, peran Pendidikan dan pelatihan sangat besarnya peranannya untuk membekali karyawan agar lebih kreatif dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk peningkatan penguasaan akan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam upaya peningkatan kinerja. Pendidikan dan pelatihan menekankan peningkatan keterampilan ataupun kemampuan dalam *Human Relation*.

Menurut Nadia, Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Penggunaan istilah Pendidikan dan pelatihan dalam suatu instansi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (Pendidikan dan pelatihan). Pendidikan (*formal*) di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan kemampuan kearah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan (*training*) sering dikacaukan penggunaannya dengan Latihan (*practice/exercise*) ialah merupakan bagian dari suatu proses Pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus

seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan latihan ialah salah satu cara untuk memperoleh keterampilan tertentu misalnya Latihan mengoperasikan komputer, Latihan mengoperasikan internet. Pelatihan merupakan wahana untuk membangun SDM menuju Era Globalisasi yang penuh dengan tantangan. Karena itu kegiatan pelatihan tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad millennium ini. Berkaitan dengan hal tersebut kita menyadari bahwa pelatihan merupakan fundamental bagi pegawai.

Menurut Mansur menjelaskan efektivitas Pendidikan dan pelatihan pegawai yang berhubungan terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai sebagai objek pembahasan ini, sedangkan alasan memilih pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah yang cukup banyak memberikan penawaran jasa telekomunikasi baik yang langsung dan tidak bersentuhan dengan Masyarakat dan instansi pemerintahan sehingga produktivitas kerja pegawai yang diharapkan dari para pegawai dapat meningkat agar organisasi atau instansi dapat terus eksis dan maju dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara merupakan aktivitas memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai guna mencapai efektivitas organisasi dan penguatan daya saing pegawai untuk bekerja dalam menghadapi beragam tantangan zaman global. Pengembangan pegawai bisa diciptakan dengan cara pengembangan karir, serta pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah haruslah memiliki kemampuan antara lain: keterampilan yang lebih, wawasan dan pengetahuan yang luas, serta bakat dan potensi, kepribadian dan motif kerja, serta yang terpenting adalah moral dan etos kerja yang maksimal.

Pengembangan aparatur sipil negara dengan cara yang strategis tentunya akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur sipil negara dalam hal untuk memiliki *Skill* (keahlian), *Knowledge* (pengetahuan), *Ability* (kemampuan) yang baik. Dengan berakal *Competency* (kemampuan) diharapkan para aparatur lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsinya dan tugasnya selaku abdi negara dan masyarakat yang kemudian tentunya dapat mewujudkan pelayanan yang prima.

Pegawai yang tidak berkompeten serta tanpa rasa profesionalisme, juga akan memberikan dampak kepada

pencapaian dari pada tujuan program yang dibuat oleh pemerintah daerah itu sendiri. Bukannya tanpa perhatian melihat masalah pegawai ASN, pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyikapi permasalahan tersebut dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengembangan ASN khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFOSANDI). Seperti dengan melaksanakan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kualitas kemampuan yang dimiliki para ASN pada Diskominfosandi Kabupaten Mamuju Tengah, karena dimana pada Diskominfosandi Kabupaten Mamuju Tengah ini pelayanan publik dalam menyediakan informasi terkait program kerja ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mamuju tengah masih dinilai kurang maksimal.

Beberapa masalah yang dapat dijumpai meliputi kinerja Diskominfosandi yang dinilai masih kurang maksimal, karena masyarakat Mamuju Tengah merasa masih sulit memperoleh informasi-informasi seputar kegiatan serta kinerja pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Di era Informasi yang begitu mudah di akses dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi, masyarakat

seharusnya tidak lagi mendapatkan hambatan yang berarti atau membuang waktu yang banyak hanya demi mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Peran Aparatur dalam birokrasi pemerintah sebagai unsur pembaru harus memiliki kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong kearah pembaruan dan pembangunan dalam berbagai kebijaksanaan atau dalam suatu rencana maupun dalam realisasi pelaksanaannya.

Untuk mencapai prestasi kerja yang diharapkan dalam suatu organisasi atau instansi, para pegawai harus mendapatkan program pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk jabatannya sehingga pegawai terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi ini terjadi pula pada birokrasi pemerintah, khususnya Diskominfosandi Kabupaten Mamuju Tengah.

Banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur di rasa kurang maksimal. Menyadari masalah ini, Diskominfosandi akan melakukan suatu inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan maka diadakan pendidikan dan pelatihan terhadap ASN Diskominfosandi Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana dengan mengikuti

pendidikan dan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kinerja ASN.

Menurut Anwar and Suparman (2022), sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang dijalankan secara manual oleh manusia atau dengan bantuan alat. Sistem ini bertujuan dalam menyajikan informasi untuk mengelola operasional, administrasi dan pengambilan keputusan suatu instansi. Ada beberapa keuntungan dari sistem informasi manajemen khususnya untuk bekerja pada keterbukaan informasi (akseibilitas data) yang ada secara tepat dan secepat mungkin untuk para pemakai atau instansi, tanpa memerlukan pendelegasian sistem informasi, mengidentifikasi kebutuhan terhadap keterampilan pendukung sistem informasi, dan membina proses perencanaan yang efektif. Pentingnya suatu instansi menerapkan sistem informasi manajemen untuk menghemat biaya karena dengan adanya SIM ini memungkinkan suatu instansi untuk menekankan biaya operasional salah satunya yaitu penekanan anggaran pengadaan ATK.

Terdapat pula sebagian ASN yang kompetensinya belum sesuai standart atau proses birokrasi yang masih panjang dan masih terjadinya efisiensi bahkan masih ditemukan adanya tindakan

korupsi yang dilakukan oknum pejabat ASN dan kurang adanya evaluasi secara objektif atas program kerjanya (Kadarisman, 2019).

Adanya pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) struktural, teknis dan fungsional, adanya kegiatan seminar dan lainnya yang telah diikuti oleh ASN, namun hal tersebut belum sepenuhnya mampu merubah kapasitas ASN di kota Mamuju Tengah atas kinerja karena diklat yang telah diikuti terbukti belum mampu membuat kinerja lebih baik. Faktor penyebabnya diantaranya adalah tidak adanya evaluasi pasca diklat secara objektif di tempat kerja, serta latar belakang pendidikan yang kadang tidak sesuai dengan jabatan.

Menurut Sabaruddin & Utomo (2021), promosi merupakan suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia yang mengalih tugaskan karyawan dari posisi suatu jabatan tertentu ke posisi jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar tugas makin luas dan kompleks, serta kompensasi yang lebih baik daripada posisi jabatan sebelumnya.

Evaluasi perilaku difokuskan pada perilaku kerja (pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku) peserta diklat setelah kembali ke dalam lingkungan kerjanya. Perilaku yang dimaksud berupa perilaku kerja yang ada

hubungannya langsung dengan materi diklat dan bukan perilaku dalam konteks hubungan personal dengan rekan kerjanya. Perubahan yang ingin diketahui dalam evaluasi ini adalah seberapa jauh perubahan sikap mental, perbaikan pengetahuan, dan penambahan keterampilan peserta ketika kembali lingkungan kerjanya. Apakah perubahan tersebut diimplementasikan dalam lingkungan kerja peserta ataukah dibiarkan berkarat dalam diri peserta tanpa pernah diimplementasikan (Muslihin, 2017).

Menurut Vaughan (2021), konsep birokrasi yang lahir dari era digital ini dikenal dengan *E-Government*. Salah satu tujuan implementasi *E-Government* tak lain adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang prima sehingga konsep Governance dapat diwujudkan secara optimal. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *E-Government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan prima.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan SDM melalui penerapan sistem pemerintahan

berbasis elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, (Awaludin, 2019).

Menurut Alrizkie (2022), metodologi ward & peppard adalah metodologi yang kompleks dan banyak metode ditempatkan pada diagram yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang diagram ini sebelum mengembangkan rencana strategis SI serta IT. Ketika organisasi sudah menginvestasikan SI/IT pada waktu lampau tetapi tidak berdampak positif yang bertujuan mengembangkan bisnis organisasi tersebut terutama dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dan melihat peluang bisnis, maka metodologi ward & peppard ini dapat mulai digunakan untuk menganalisis kondisi tersebut.

Penyebarluasan informasi kinerja pemerintah dan pembangunan secara umum dapat dinyatakan telah berjalan sesuai dengan standar harapan warga kota. Diskominfo kota Mamuju Tengah dianggap telah berupaya menyampaikan informasi kepada seluruh stakeholders melalui halaman websait <https://kominfopersmamujutengahkab.go.id>. Penyebarluasan informasi dianggap sudah berjalan cukup optimal dengan

adanya pengawasan dari *stakeholders* yang gencar dilakukan pengawasan, sehingga mampu mengontrol dan akhirnya menjadi percontohan bottom up planning. Dengan demikian masyarakat dapat berperan serta lebih optimal untuk turut menyebarkan informasi (Dewi and Furqon, 2020).

Penelitian Lenak, (2021), yang melakukan penelitian mengenai kajian Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Elektronik Governmen atau *Elektronic Government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan serta menjelaskan Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan keunikan

obyek yang diteliti, memahami proses dan atau interaksi sosial, menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan triangulasi sumber, teknik dan waktu lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 1 0 47' 82" – 2 0 17' 31 Lintang Selatan dan 100 24' 08 Bujur Timur. Kabupaten Mamuju Tengah yang beribukota di Tobadak, berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara di sebelah Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan di Sebelah Timur, Kabupaten Mamuju di sebelah Selatan serta Selat Makassar di sebelah Barat.

Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari 5 Kecamatan memiliki luas wilayah 3014,37 km². Kecamatan Karossa adalah Kecamatan terluas dengan luas 1093,54 km² atau 36,28 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Kecamatan Pangale dengan luas wilayah sebesar 115.69 km² atau 3,84 persen dari total luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, merupakan Kecamatan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kominfo pertama kali terbentuk di Mamuju Tengah pada Tahun 2013 yang dikepalai oleh Drs. Abdul Latif Settaring, M.Pd. Dimana pada saat itu Kominfo masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah sehingga Organisasi Perangkat Daerah (DPD) tersebut dinamakan Dishub Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah.

Seiring dengan berkembangnya zaman, aturan pun berubah, pada Tahun 2016 Kominfo berdiri sendiri dan dinamakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Drs. Andi Gapri, M.Pd. kemudian Pada Tahun 2022 Kepala Dinas bergeser dan digantikan oleh Drs. Salman Ali, M.Pd.

Pada Tahun 2023 Kepala Dinas Kominfo Mamuju Tengah mengalami pergeseran kembali yang dimana Drs. Salman Ali, M.Pd digantikan oleh Drs. Bambang Suparni, M.Pd hingga saat ini. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari tiga bidang yaitu Bidang komunikasi, Bidang Informatika dan statistik, dan Bidang Persandian. Itulan bidang-bidang yang ada dalam Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini.

Baru-baru ini diadakan pertemuan dan membahas Rencana Kerja Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025 bahwa Dinas kominfo Kabupaten Mamuju Tengah akan dilakukan perkembangan kembali tepatnya pada bidang Informatika dan Statistik akan dipisahkan yang dimana akan dibagi menjadi empat Bidang yaitu, Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP), Bidang Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian.

Dari hasil pengamatan dapat di ketahui bahwa Dinas Kominfo Mamuju Tengah dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengembangan teknologi sudah dikatakan sangat bagus karena pihak Dinas Kominfo Mamuju Tengah setiap tahun selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan teknologi setiap bidang agar ASN bisa melayani masyarakat dengan cepat.

Pendidikan dan pelatihan pada bidang Komunikasi dan informatika sudah di katakan sangat bagus karena pihak Kominfo selalu mengadakan pelatihan pengembangan dalam pengoperasian media dan website pada bidang komunikasi dan informatika dalam memberikan informasi berita yang sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pengoperasian sebuah aplikasi yang baru bernama Sistem Informasi Arsitektur (SIA) sudah dikatakan sangat bagus karena pihak pegawai yang di utus dalam pengembangan suatu sistem tersebut sudah memahami betul terkait tentang pengoperasian suatu aplikasi yang begitu penting dalam melalukan penginputan jumlah OPD yang mengakses internet di Kabupaten Mamuju Tengah.

Efektivitas pendidikan dan pelatihan di bidang komunikasi dan informatika dalam meningkatkan layanan publik sudah dikatakan sangat bagus karena pihak Dinas Kominfo selalu melakukan pelatihan terkait pengembangan Skill dan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan suatu aplikasi yang berkaitan dengan layanan publik agar masyarakat mendapatkan informasi penting di Kabupaten Mamuju Tengah.

Terkait dengan efektivitas Pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sudah dikatakan sangat bagus karena pihak Kominfo selalu mengembangkan skill dan kemampuan di setiap bidang yang ada di kantor agar memberikan informasi kepada Masyarakat bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala di setiap bidang. Pihak Kominfo

itu sendiri setiap bulan selalu melakukan evaluasi terkait pengoperasian suatu aplikasi di masing-masing bidang yang ada di kantor supaya bisa diperbaiki kendala yang terjadi pada saat pengoperasian suatu aplikasi.

Terkait pada bidang komunikasi dan informatika di Dinas Kominfo sudah dikatakan sangat bagus karena pada bidang tersebut selalu mengembangkan pengoperasian suatu aplikasi yang terkait dengan penginformasian suatu berita kepada Masyarakat. Pihak Kominfo selalu mengutus pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan suatu aplikasi yang berbasis digital agar karyawan bisa mendalami suatu aplikasi yang begitu penting dalam memberikan informasi kepada Masyarakat. Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sangat penting diberikan kepada pegawai untuk dapat meningkatkan Profesionalisme, keterampilan, keahlian, pengetahuan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan bekerja sama serta sikap yang dapat dilihat dari teori efektivitas menurut Menurut Richard M. Steers yang dimana dapat dilihat dari pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi yang dimana dapat diketahui apakah efektivitas dari Diklat dapat

meningkatkan kinerja pegawai, sehingga dapat dilihat kinerja pegawai meningkat sesuai dengan tujuan atau sasaran di dalam administrasi. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sudah terealisasikan dengan baik sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Faktor internal pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah adanya kompetensi dari ASN, komitmen dari organisasi atau Dinas, ketersediaan sumber daya, dan adanya budaya organisasi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, sehingga dapat dilihat kinerja pegawai meningkat sesuai dengan tujuan atau sasaran di dalam administrasi, dan yang menjadi faktor eksternal pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah adanya kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan informasi, tingkat partisipasi dan kondisi ekonomi dan sosial yang dimana dengan mengetahui apa saja faktor-faktor dari pendidikan dan pelatihan terhadap ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah, pemberian pendidikan dan pelatihan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan para ASN di Dinas Kominfo. Sehingga hasil dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan sangat menunjang kepada proses pemebrian

pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini dilakukan di lapangan tentang Efektivitas Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah.

Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sangat penting diberikan kepada pegawai untuk dapat meningkatkan Profesionalisme, keterampilan, keahlian, pengetahuan, ketepatan waktu, kehadiran, kemampuan bekerja sama serta sikap yang dapat dilihat dari teori efektivitas menurut Menurut Richard M. Steers yang dimana dapat dilihat dari pencapaian tujuan, integritas dan adaptasi yang dimana dapat diketahui apakah efektivitas dari Diklat dapat meningkatkan kinerja pegawai, sehingga dapat dilihat kinerja pegawai meningkat sesuai dengan tujuan atau sasaran di dalam administrasi. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah sudah terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Faktor internal pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah adanya kompetensi dari ASN, komitmen dari organisasi atau Dinas, ketersediaan sumber daya, dan adanya budaya organisasi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai, sehingga dapat dilihat kinerja pegawai meningkat sesuai dengan tujuan atau sasaran di dalam administrasi, dan yang menjadi faktor eksternal pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah adanya kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan informasi, tingkat partisipasi dan kondisi ekonomi dan sosial yang dimana dengan mengetahui apa saja faktor-faktor dari pendidikan dan pelatihan terhadap ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah, pemberian pendidikan dan pelatihan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan para ASN di Dinas Kominfo. Sehingga hasil dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan sangat menunjang kepada proses pemebrian pelayanan publik yang memuaskan kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu: 1) Untuk Pemimpin agar lebih memperhatikan dalam meningkatkan Kinerja ASN di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Tengah dengan

menyiapkan sumber daya yang baik agar seluruh ASN dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya ASN yang masih belum mengikuti Diklat agar kinerja ASN dapat lebih maksimal dalam pelayanannya; 2) Untuk ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat merealisasikan dengan baik, sehingga dapat bekerja dengan baik dan juga dapat melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing; 3) Sebaiknya ASN yang ada di Dinas Kominfo diberikan kesempatan untuk selalu mengikuti Diklat yang artinya Diklat yang berkesinambungan sehingga mengetahui perkembangan pengetahuan, teknologi untuk masa kini dan dimasa yang akan datang.

REFERENSI

- Abdul Sabaruddin, Utomo, P. P., & Fait, T. (2021). Pelaksanaan Promosi Jabatan Berdasarkan Merit System di Kabupaten Kolaka Dan Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), pp. 74–84. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.74-84>
- Alrizkie, M., Herliah, D., Lestari, S., & Sutedi. (2022). Perencanaan Strategis Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dengan Metode Ward & Peppard. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 2022*, 2009(April 2009), pp. 217–224.
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), pp. 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Dewi, L. R., & Furqon, E. (2020). Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Dalam Penyebarluasan Informasi Dan Tata Kelola Pemerintah Daerah. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 3(1), pp. 9–22. <https://doi.org/10.15294/islrev.v3i1.48950>
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)* (Suryani (ed.); Ke Lima). Bandung: Alfabeta.
- Kadarisman, M. (2019). Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1), pp. 17–32. <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.202>
- Kurey, A. Y. (2022). *Strategi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Dan Statistik Dalam Penerapan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat* (Laporan Tugas Akhir, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang)
- Lenak, S. M. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *Jurnal Governance*, 1(1), p. 2.

- Muslihin. (2017). Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 18(1), p. 22.
<https://doi.org/10.21009/jtp1801.3>
- S, F. M. D. R., Anwar, H. S., & Suparman, N. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi Simakci Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(2), pp. 72–83.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i2.73>
- Steers, R. M. (1999). *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. p.53
- Vaughan, R., Busthomi, R. H., & Putri, A. A. (2021). Implementasi Kebijakan E-Government Melalui Website Subang.go.id Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. *Syntax Idea*, 3(6), pp. 1431–1441.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i6.1274>